

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022**



**KECAMATAN TATAH MAKMUR
KABUPATEN BANJAR
KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022 ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum,serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SDKP Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Tatah Makmur sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat,baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Tatah Makmur, 31 Januari 2023

Camat Tatah Makmur



Gt.M.Noviar Hidayat. SSTP. M.Si

NIP. 19851107 200412 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..	5
D. Isu Strategis	7
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Indikator Kinerja Utama	9
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	63
C. Realisasi Anggaran	67
D. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022..	77
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran - Saran.....	79
LAMPIRAN	80

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Perubahan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Cukup berhasil** dengan capaian kinerja **85,15 %**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi.

Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Tatah Makmur berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Tatah Makmur adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Tatah Makmur
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Tatah Makmur kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Tatah Makmur
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Tatah Makmur

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh (*SKPD*) Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tatah Makmur Kab. Banjar Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

- 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tatah Makmur
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
 7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja SKPD.

B.1 KEDUDUKAN :

Kecamatan Tatah Makmur merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS :

Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni

2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.3 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa.

Susunan Organisasi Kecamatan Tatah Makmur terdiri dari:

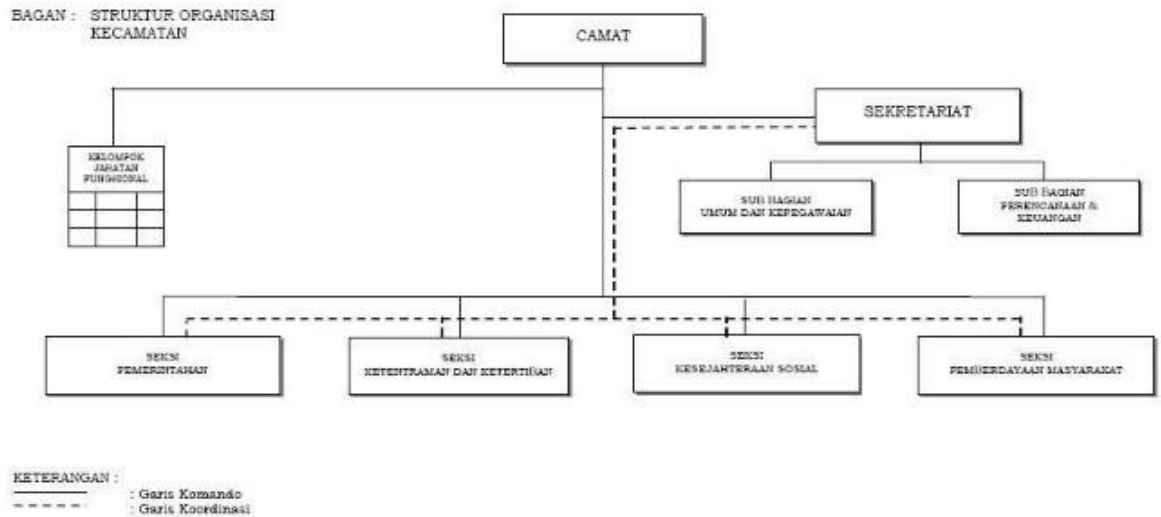
Susunan organisasi Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3. Kepala Seksi Pemerintahan
- 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 2.1. Bagan SOTK Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar



Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Tatah Makmur yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Tatah Makmur masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I

Tabel Permasalahan pada SKPD

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan

		Pemerintahan Umum Kecamatan
	Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
	Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan.
		Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Tatah Makmur secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Tatah Makmur sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Tatah Makmur adalah :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum, yang meliputi
:
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Ke Kecamatan
3. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
5. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
6. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKj IP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2022 dan Realisasi

Anggaran Tahun 2022 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Tatah Makmur mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Tatah Makmur mendukung pencapaian misi Keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

- a. Misi Keempat : Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber : Surat Keputusan IKU SKPD

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pagu Anggaran									2.481.692.786	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai					70	2.481.692.786	Camat
1	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian		persen	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur	Indek	73	2.344.174.286	Sekretaris Camat
			Persen	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD	Persen	100%	3.821.120	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	6	270.000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	375.000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	75.000	Kasubbag Perenkeu
			Dokumen	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	450.000	Kasubbag Perenkeu

		Dokumen	1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.156.120	Kasubbag Perenkeu
		laporan	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	750.000	Kasubbag Perenkeu
		laporan	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	745.000	Kasubbag Perenkeu
		Persen	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.929.702.786	Kasubbag Perenkeu
		orang/bulan	14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	1.894.692.786	Kasubbag Perenkeu
		Dokumen	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	34.200.000	Kasubbag Perenkeu
		laporan	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	810.000	Kasubbag Perenkeu
		Persen	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	9.499.800	Kasubbag Perenkeu
		laporan	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	499.800	Kasubbag Perenkeu
		laporan	12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	9.000.000	Kasubbag Perenkeu
		persen	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	10.700.000	Kasubbag Umpeg
		Dokumen	1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	700.000	Kasubbag Umpeg
		Orang	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	10.000.000	Kasubbag Umpeg
		persen	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	114.117.180	Kasubbag Umpeg

			paket	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4.107.400	Kasubbag Umpeg
			paket	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.590.080	Kasubbag Umpeg
			paket	7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	1.823.500	Kasubbag Umpeg
			paket	22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	22	12.000.000	Kasubbag Umpeg
			paket	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2.846.200	Kasubbag Umpeg
			laporan	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	83.750.000	Kasubbag Umpeg
			persen	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	21.507.000	Kasubbag Umpeg
			unit	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-	Bendahara Barang
			Unit	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1.762.000	Bendahara Barang
			Unit	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9.745.000	Bendahara Barang
			Unit	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	Bendahara Barang
			persen	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	144.974.400	Kasubbag Umpeg
			laporan	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.200.000	Kasubbag Umpeg
			laporan	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	16.994.400	Kasubbag Umpeg
			laporan	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	126.780.000	Kasubbag Umpeg
			persen	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100%	100%	109.852.000	Kasubbag Umpeg
			unit	7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	76.982.000	Kasubbag Umpeg
			unit	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	10.870.000	Kasubbag Umpeg

			unit	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	Kasubbag Umpeg
			unit	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	10.000.000	Kasubbag Umpeg
2	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan		persen	83	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	83%	5.506.000,000	Kasi Kessos
			persen	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	506.000,000	Kasi Kessos
			laporan	6	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	506.000,000	Kasi Kessos
			persen	100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	100%	100%	5.000.000,000	Kasi Kessos
			laporan	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	5.000.000	Kasi Kessos
3	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		persen	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100%	43.513.400,000	Kasi PM
			persen	100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100%	43.513.400,000	Kasi PM
		Lembaga Kemasyarakatan		13	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	13	7.513.400	Kasi PM
			laporan	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	36.000.000	Kasi PM
4	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		persen	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta	Persen	100%	9.303.200	Kasi Trantib

	umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan					perlindungan masyarakat di kecamatan				
			persen	100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100%	6.651.600	Kasi Trantib
			laporan	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4.000.000	Kasi Trantib
			laporan	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	2.651.600	Kasi Trantib
			persen	100	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	100%	2.651.600	Kasi Trantib
			laporan	2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	2.651.600	Kasi Trantib
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum "		persen	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	65.195.900	Kasi PEM
			persen	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	65.195.900	Kasi PEM
			Orang	100	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	18.200.000	Kasi PEM

			Dokumen	3	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	46.995.900	Kasi PEM
6	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan		persen	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	14.000.000	Kasi PEM
			persen	100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Persen	100%	14.000.000	Kasi PEM
			Dokumen	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	2.000.000	Kasi PEM
			Dokumen	1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	2.000.000	Kasi PEM
			Dokumen	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	6.000.000	Kasi PEM
			Dokumen	1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	2.000.000	Kasi PEM
			Dokumen	2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	2	2.000.000	Kasi PEM

Tabel 2.2 di atas memuat data yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tatah Makmur tahun 2022 yang penetapannya dilakukan secara berjenjang (Pohon Kinerja) dimana Sasaran Strategis dan Program berada dibawah tanggung jawab Camat selaku Kepala SKPD Kecamatan Tatah Makmur (eselon III a.) sedangkan Sasaran Program dan Kegiatan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab Sekretariat dan Seksi (eselon III b dan IV).

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2022

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Tatah Makmur Kab. Banjar tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Orange
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning
5	< 50%	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
				SATUAN	TAHUN 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pagu Anggaran					2.481.692.786			
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan		70 Nilai	2.481.692.786	2.115.516.486	85,24	Berhasil
1	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur		73 Indeks	2.344.174.286	1.988.221.286	84,82	Berhasil
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	100% Persen	3.821.120	3.805.000	99,58	Berhasil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	6 Dokumen	270.000	270.000	100,00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	375.000	375.000	100,00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	75.000	75.000	100,00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	450.000	450.000	100,00	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1.156.120	1.150.000	99,47	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	750.000	740.000	98,67	Berhasil
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	745.000	745.000	100,00	Berhasil
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Realisasi / Rencana X 100 %	100% Persen	1.929.702.786	1.597.165.313	82,77
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi / Rencana X 100 %	14 Orang/bulan	1.894.692.786	1.565.175.713	82,61	Berhasil

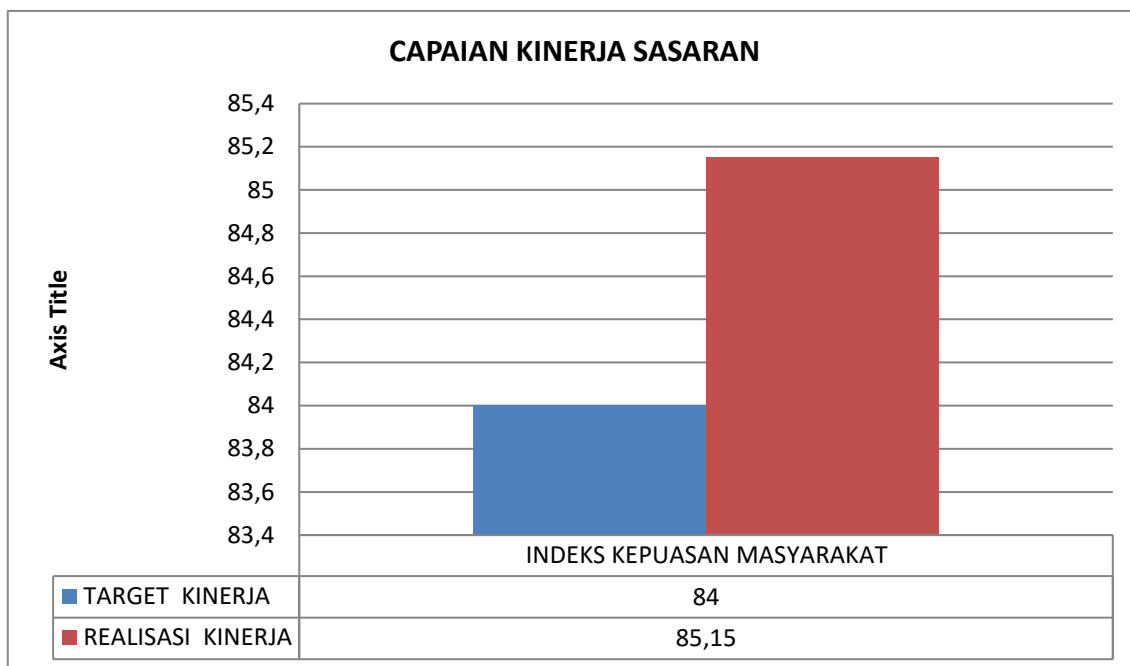
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 Dokumen	34.200.000	31.560.000	92,28	Berhasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	810.000	429.600	53,04	Cukup Berhasil
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Realisasi / Rencana X 100 %	100% Persen	9.499.800	9.367.500	98,61	Berhasil
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	1 laporan	499.800	367.500	73,53	Cukup Berhasil
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	9.000.000	9.000.000	100,00	Berhasil
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	10.700.000	10.700.000	100,00	Berhasil
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Realisasi / Rencana X 100 %	1 Dokumen	700.000	700.000	100,00	Berhasil
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang	10.000.000	10.000.000	100,00	Berhasil
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	114.117.180	110.679.010	96,99	Berhasil
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	5 Paket	4.107.400	3.148.700	76,66	Berhasil
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.590.080	9.240.080	96,35	Berhasil
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		7 Paket	1.823.500	1.823.500	100,00	Berhasil
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		22 Paket	12.000.000	12.000.000	100,00	Berhasil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	2.846.200	2.598.720	91,30	Berhasil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	83.750.000	81.868.010	97,75	Berhasil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	21.507.000	18.225.000	84,74	Cukup Berhasil
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Realisasi / Rencana X 100 %	1 unit	-	-		

	Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Disediakan							
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 unit	1.762.000	-		0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit	9.745.000	8.875.000		91,07	Berhasil
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	10.000.000	9.350.000		93,50	Berhasil
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	144.974.400	141.577.313		97,66	Berhasil
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.200.000	1.200.000		100,00	Berhasil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	12 Laporan	16.994.400	13.602.827		80,04	Berhasil
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		7 Laporan	126.780.000	126.774.486		100,00	Berhasil
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	100% persen	109.852.000	96.702.150		88,03	Berhasil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 unit	76.982.000	70.739.150		91,89	Berhasil
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Realisasi / Rencana X 100 %	3 unit	10.870.000	5.015.000		46,14	Kurang Berhasil
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	12.000.000	11.000.000		91,67	Berhasil
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	10.000.000	9.948.000		99,48	Berhasil
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	100% persen	5.506.000	5.100.000		92,63	Cukup Berhasil
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak		100% persen	506.000	100.000		19,76	Kurang Berhasil

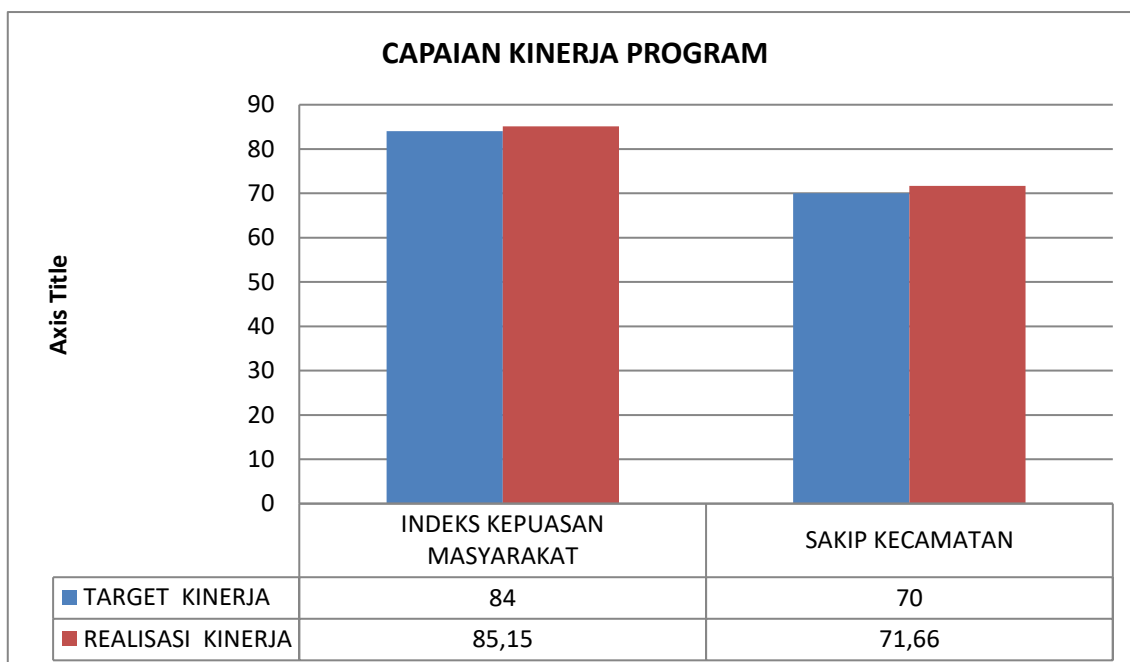
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemertu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	6 laporan	506.000	100.000	19,76	Kurang Berhasil	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan		100%	5.000.000	5.000.000	100,00	Berhasil	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	100,00	Berhasil	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	RUMUS : Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Dilaksanakan di Bagi Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Direncanakan dikali 100%	100% persen	43.513.400	37.514.000	86,21	Berhasil	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana		100% Persen	43.513.400	37.514.000	86,21	Berhasil	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.513.400	7.510.000	99,95	Berhasil	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	3 Laporan	36.000.000	30.004.000	83,34	Berhasil	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		100% persen	9.303.200	9.053.200	97,31	Berhasil	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan	100% persen	6.651.600	6.401.600	96,24	Berhasil	

			masyarakat di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan meliputi sosialisasi perda/perkada, FKUB, Linmas desa, izin penelitian, dll	1 laporan	4.000.000	3.750.000	93,75	Berhasil
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 laporan	2.651.600	2.651.600	100,00	Berhasil
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		100%	2.651.600	2.651.600	100,00	Berhasil
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Trantibumlinmas yang terlaksana	2 laporan	2.651.600	2.651.600	100,00	Berhasil
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	65.195.900	62.628.000	96,06	Berhasil
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana dibagi Total Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Akan Dilaksnaakan diKecamatan di Kali 100%	100%	65.195.900	62.628.000	96,06	Berhasil
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (HUT RI dan Rakor Forkopimcan, Kegiatan Keagamaan)	100 orang	18.200.000	18.200.000	100,00	Berhasil

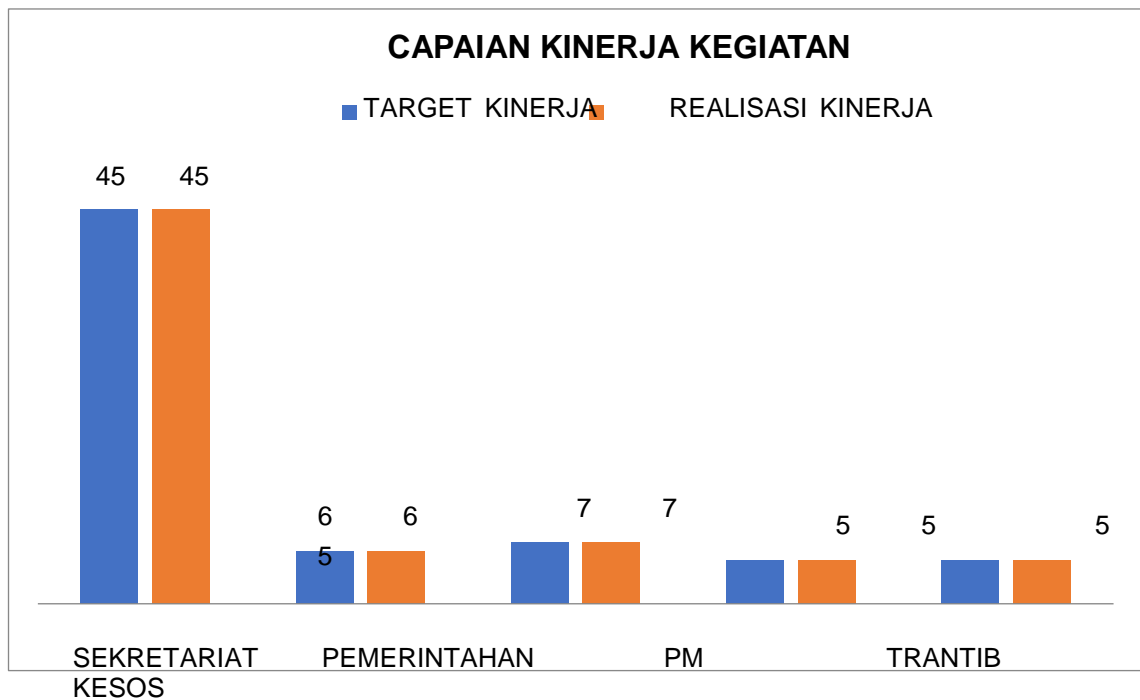
		Kesatuan Republik Indonesia						
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		3 Dokumen	46.995.900	44.428.000	94,54	Berhasil
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			14.000.000	13.000.000	92,86	Berhasil
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	RUMUS : Jumlah desa/kelurahan Yang Difasilitasi DIBAGI DENGAN Jumlah seluruh Desa yang ada di Kecamatan DIKALI 100%.	100% persen	14.000.000	13.000.000	92,86	Berhasil
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Menunjuukan Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjarangan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuangam dan aset desa, Terfasilitasinya penyelenggaraan pilkades penjarangan perangkat desa keuangan dan aset desa penyelenggaraan pemilihan BPD penyelenggaraan tapal batas terfasilitasinya BKAD Pelayanan PBB	1 dokumen	2.000.000	2.000.000	100,00	Berhasil
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 dokumen	2.000.000	2.000.000	100,00	Berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 dokumen	6.000.000	5.000.000,000	83,33	Berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 dokumen	2.000.000	2.000.000,000	100,00	Berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		2 dokumen	2.000.000	2.000.000,000	100,00	Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							92	Sangat Tinggi



Indikator kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 85,15 , bila di bandingkan dengan target 84 maka capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101,37% dengan capaian tersebut maka kinerja masuk dalam kategori **Berhasil**.



Indikator capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 85,15 , bila di dibandingkan dengan target 84 maka capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101,37% dengan capaian tersebut maka kineja masuk dalam kategori **Berhasil** sedangkan untuk indikator capaian program SAKIP Kecamatan tahun 2022 realisasi kinerjanya sebesar 71,66, bila dibandingkan dengan target 70 maka di peroleh capaian kinerja nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 102,37 %, dengan capaian tersebut maka capaian kinerja masuk dalam kategori **Berhasil**.



1. Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi kinerja keseluruhan ada 45 Laporan, bila di dibandingkan dengan target kinerja 45 Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, adapun indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan adalah sebagai berikut :

- Laporan Administrasi Kepegawaian

Target 8 (delapan) laporan, realisasi 8 (delapan) laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), laporan terdiri dari :

1. Laporan Usul Kepangkatan dan Kenaikan Pangkat
2. Laporan Kenaikan Gaji Berkala
3. Laporan Permintaan Cuti
4. Laporan Pembuatan Kartu (Karis/Karsu, Karpeg, Taspen)
5. Laporan Pembuatan DUK, Nominatif, Daftar Susunan Pegawai
6. SKP, SPJ, SPMT
7. Laporan Mutasi dan Promosi
8. Laporan Pemberhentian/Pensiun

□ Laporan Penatausahaan Kantor

Target 12 (dua belas) laporan surat masuk/keluar yang di buat setiap bulan, realisasi 12 (dua belas) laporan surat masuk/keluar, capaian kinerja 100% (Berhasil)

□ Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Target 1 (satu) laporan, realisasi 1 (satu) laporan, capaian kinerja 100%, Laporan terdiri dari Laporan Kegiatan Belanja Modal

□ Laporan Pelayanan PATEN

Target 12 (dua belas) laporan, realisasi 12 (dua belas) laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), laporan terdiri dari :

1. Laporan Pindah/Datang
2. Laporan Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP
3. Laporan Dispensasi/Rekomendasi Nikah
4. Laporan Legalisasi Kesaksian Pernikahan
5. Laporan Legalisasi Proposal
6. Laporan Surat Keterangan Domisili
7. Laporan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
8. Laporan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Laporan Keterangan Kematian
10. Laporan Legalisasi Surat/SK
11. Laporan Legalisasi Surat Keterangan Waris
12. Laporan Izin Mengumpulkan Orang Banyak

- Laporan Barang Milik Daerah
Target 2 (dua) laporan, realisasi 2 (dua) laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), Laporan terdiri dari :
 1. Laporan Semesteran
 2. Laporan Tahunan
- Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan
Target 10 (sepuluh) jenis laporan, realisasi 10 (sepuluh) jenis laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), laporan terdiri dari :
 1. Laporan Renstra dan Renja
 2. Laporan Perjanjian Kinerja
 3. Laporan RKT dan Rencana Aksi
 4. Laporan Capaian Kinerja
 5. Laporan IKU
 6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
 7. Laporan LPPD
 8. Dokumen RKA,DPA,DPPA
 9. Laporan Realisasi Fisik Keuangan dan Laporan Evaluasi RKPD
 10. Laporan Keuangan Unaudited/Audited
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi kinerja 6 laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 6 laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, laporan terdiri dari :
 1. Pendamping pembuatan perdes dan APBDes
 2. Kegiatan koordinasi kependudukan
 3. Kegiatan koordinasi dengan instansi vertical dan para pambakal
 4. Kegiatan Sosialisasi penilaian kepala desa
 5. Kegiatan Sosialisasi penilaian sekmen desa
 6. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan realisasi kinerja 7 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 7 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Laporan Kegiatan Musrenbang Tk.Kecamatan
2. Laporan Kegiatan Sosialisasi IUMK
3. Laporan Kegiatan PKK Kecamatan
4. Kegiatan melaksanakan inventarisasi / pendataan rumah dan ruko ber IMB
5. Kegiatan permusrenbangan TK. Kecamatan
6. Kegiatan evaluasi pembangunan desa
7. Kegiatan bantuan usaha micro

□ Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi kinerja 5 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 5 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban desa
2. Kegiatan Fasilitasi/Dukungan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pilkada
3. Sosialisasi FKUB
4. Sosialisasi penegakan PERDA tentang izin mendirikan bangunan
5. Sosialisasi penegakan PERDA tentang larangan meracun ikan

□ Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan realisasi kinerja 5 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 5 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Laporan Pendataan/ Inventarisir Petugas Poskesos
2. Laporan Inventarisir Kegiatan Kecamatan Sehat
3. Laporan Inventarisir Pendataan Masjid dan Marbot Masjid

4. Laporan Inventarisir Pendataan Bantuan Social Sembako dan Bencana Alam
5. Laporan Pendataan/ Inventarisir Jumlah Pemuda Yang Menjadi Anggota Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Tatah Makmur sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Indeks	63,85	101,35 %			69,9	107,54 %	71,66	102,37 %
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai	81,5	100%	82,46	99,35 %	82,38	98,07 %	85,15	101,37 %
3	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tata Makmur		Indek								...
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
4	a. Laporan Administrasi Kepegawaian		Laporan	8	100%	8	100%	8	100%	Tidak Menjadi Indikator Lagi	
	b. Laporan Penatausahaan Kantor		Laporan	12	100%	12	100%	12	100%		
	c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Laporan	1	100%	1	100%	1	100%		
	d. Laporan Pelayanan PATEN		Laporan	12	100%	12	100%	12	100%		

	e. Laporan Barang Milik Daerah		Laporan	2	100%	2	100%	2	100%	
	f. Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan		Jenis Laporan	10	100%	10	100%	10	100%	
5	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Jenis Laporan	6	100%	6	100%	6	100%	
6	Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Jenis Laporan	7	100%	7	100%	5	100%	

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

7	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen		100	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	Dokumen		6	100%
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		1	100%
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen		1	100%

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		1	100%
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		1	100%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		4	100%
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		2	100%
8	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen		100	100%
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi / Rencana X 100 %	Orang/bulan		14	100%

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		2	100%
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		1	100%
	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen		100	100%
9	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	Laporan		1	100%
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		12	100%
10	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen		100	100%
	Jumlah Dokumen Monitoring,	Realisasi / Rencana X 100 %	Dokumen		21	100%

	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		1	100%
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen		100	100%
11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	Paket		5	100%
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		1	100%
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		7	100%
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Paket		22	100%
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		3	100%
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Laporan		4	100%

	dan Konsultasi SKPD										
12	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen		100	100%
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	Unit		0	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		0	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		1	100%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		1	100%
13	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen		100	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Realisasi / Rencana X 100 %	Laporan		1	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		12	100%

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		7	100%
	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen		100	100%
14	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Realisasi / Rencana X 100 %	Unit		7	100%
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		3	100%
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		1	100%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		1	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
15	Persentase Penyelenggaraan Urusan		Persen		100	100%

	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	Laporan		6	100%
	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan		Persen		100	100%
16	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	Laporan		4	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
17	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan		Jenis Laporan	7	100%	7	100%	7	100%	Tidak Menjadi Indikator Lagi	
18	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana		Persen		100	100%

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	Lembaga Kemasyarakatan		13	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Laporan		3	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
19	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan		Jenis Laporan	5	100%	5	100%	5	100%	Tidak Menjadi Indikator Lagi	
20	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	Persen		100	100%
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di	Laporan		1	100%

	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan meliputi sosialisasi perda/perkada, FKUB, Linmas desa, izin penelitian, dll									
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Laporan		1	100%
	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		Persen		100	100%
21	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Trantibumli nmas yang terlaksana	Laporan		2	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											

22	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana dibagi Total Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Akan Dilaksnaakan diKecamatan di Kali 100%	Persen	100	100%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (HUT RI dan Rakor Forkopimcan, Kegiatan Keagamaan)	orang	100	100%

	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Dokumen		3	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
23	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	RUMUS : Jumlah desa/kelurahan Yang Difasilitasi DIBAGI DENGAN Jumlah seluruh Desa yang ada di Kecamatan DIKALI 100%.	Persen		100	100%
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Menunjukkan Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan	Dokumen		1	100%

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	termasuk pilkades, penjarangan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuamgam dan aset desa, Terasilitasinya penyelenggaraan pilkades penjarangan perangkat desa keuangan dan aset desa penyelenggaraan pemilihan BPD penyelenggaraan tapal batas terfasilitasinya BKAD Pelayanan PBB	Dokumen		1	100%
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Dokumen		1	100%
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Dokumen		1	100%
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Dokumen		2	100%

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dan 2021 Kecamatan Tatah Makmur menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran namun berdasarkan Renstra Perubahan pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator kinerja sasaran di mana Kecamatan Tatah Makmur menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Capaian kinerja Sasaran Program Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 101,37% % di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,07% maka pada tahun 2022 ini kenaikan nilai capaian kinerja sehingga nilai tersebut mencapai target tahun 2022 yang sudah di tentukan.

Sedangkan untuk Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 sebesar 71,66 % tahun 2021 sebesar 69,9%.

Untuk capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, Capaian indikator kinerja Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, artinya semua indikator kinerja kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi semua sesuai dengan target kegiatan

Tabel 3.4

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2022-2026

SKPD : Kecamatan Tatah Makmur

Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
									Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek	84	2.444.69 2.786	85	2.542.48 0.497	86	2.644.17 9.717	87	2.749.84 7.096	88,3 1	2.861.04 7.748	88,3 1	13.242.24 7.845	Camat	Kab. Banjar, Kec. Tatah Makmur
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan							Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	70	2.444.69 2.786	73	2.542.48 0.497	77	2.644.17 9.717	81	2.749.84 7.096	85	2.861.04 7.748	85	13.242.24 7.845	Camat	Kab. Banjar, Kec. Tatah Makmur
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur	Indek	73	2.305.07 0.286	74	2.397.27 3.097	76	2.493.16 4.021	78	2.592.89 0.582	80	2.696.60 6.205	80	12.485.00 4.192	Sekretaris Camat	Kab. Banjar, Kec. Tatah Makmur
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100 %	3.415.00 0	100 %	3.551.60 0	100 %	3.693.66 4	100 %	3.841.41 1	100 %	3.995.06 7	100 %	18.496.74 2	Kasubbag Perenkeu	Kab. Banjar, Kec. Tatah Makmur

	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	6	270.000	6	280.800	6	292.032	6	303.713	6	315.862	30	1.462.407	Kasubba g Perenke u	Kab. Banja r, Kec. Tatah Mak mur
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	375.000	1	390.000	1	405.600	1	421.824	1	438.697	5	2.031.121	Kasubba g Perenke u	Kab. Banja r, Kec. Tatah Mak mur
	7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	75.000	1	78.000	1	81.120	1	84.365	1	87.739	5	406.224	Kasubba g Perenke u	Kab. Banja r, Kec. Tatah Mak mur
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	450.000	1	468.000	1	486.720	1	506.189	1	526.436	5	2.437.345	Kasubba g Perenke u	Kab. Banja r, Kec. Tatah Mak mur
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	750.000	1	780.000	1	811.200	1	843.648	1	877.394	5	4.062.242	Kasubba g Perenke u	Kab. Banja r, Kec. Tatah Mak mur

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	750.000	4	780.000	4	811.200	4	843.648	4	877.394	20	4.062.242	Kasubba g Perenke u	Kab. Banja r, Kec. Tata Mak mur
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	2	745.000	2	774.800	2	805.792	2	838.024	2	871.545	10	4.035.160	Kasubba g Perenke u	Kab. Banja r, Kec. Tata Mak mur
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.929.702.786	100%	2.006.890.897	100%	2.087.166.533	100%	2.170.653.195	100%	2.257.479.322	100%	10.451.892.734	Kasubb ag Perenke u	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	1.894.692.786	14	1.970.480.497	14	2.049.299.717	14	2.131.271.706	14	2.216.522.574	70	10.262.267.281	Bendaha ra	Kab. Banja r, Kec. Tata Mak mur
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	34.200.000	2	35.568.000	2	36.990.720	2	38.470.349	2	40.009.163	10	185.238.232	Bendaha ra	Kab. Banja r, Kec. Tata Mak mur
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	810.000	1	842.400	1	876.096	1	911.140	1	947.585	5	4.387.221	Bendaha ra	Kab. Banja r, Kec. Tata Mak mur

	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	9.499.800	100%	9.879.792	100%	10.274.984	100%	10.685.983	100%	11.113.422	100%	51.453.981	Kasubbag Perenkeu	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
	7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	499.800	1	519.792	1	540.584	1	562.207	1	584.695	5	2.707.078	Bendahara Barang	Kab. Banja r, Kec. Tatah Mak mur
	7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	9.000.000	12	9.360.000	12	9.734.400	12	10.123.776	12	10.528.727	60	48.746.903	Bendahara Barang	Kab. Banja r, Kec. Tatah Mak mur
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	20.700.000	100%	21.528.000	100%	22.389.120	100%	23.284.685	100%	24.216.072	100%	112.117.877	Kasubbag Umpeg	Kab. Banja r, Kec. Tata h Mak mur
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	14		14	0	14	7.500.000	14		14	7.800.000	28	15.300.000	Kasubbag Umpeg	Kab. Banja r
	7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	700.000	1	728.000	1	757.120	1	787.405	1	818.901	5	3.791.426	Kasubbag Umpeg	Kab. Banja r
	7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	20.000.000	5	20.800.000	5	21.632.000	5	22.497.280	5	23.397.171	25	108.326.451	Kasubbag Umpeg	Kab. Banja r, Kec. Tatah Mak mur
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	63.835.580	100%	66.389.003	100%	69.044.563	100%	71.806.346	100%	74.678.600	100%	345.754.092	Kasubbag Umpeg	Kab. Banja r, Kec. Tata h Mak mur

7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.313.800	5	1.366.352	5	1.421.006	5	1.477.846	5	1.536.960	25	7.115.965	Kasubba g Umpeg	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.590.080	1	9.973.683	1	10.372.631	1	10.787.536	1	11.219.037	5	51.942.967	Kasubba g Umpeg	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	7	1.823.500	7	1.896.440	7	1.972.298	7	2.051.190	7	2.133.237	35	9.876.664	Kasubba g Umpeg	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	22	10.000.000	22	10.400.000	22	10.816.000	22	11.248.640	22	11.698.586	110	54.163.226	Kasubba g Umpeg	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2.846.200	3	2.460.048	3	2.558.450	3	2.660.788	3	2.767.219	15	13.292.705	Kasubba g Umpeg	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
7	1	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			1	500.000	1	520.000	1	540.800	1	562.432	4	2.123.232	Kasubba g Umpeg	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	38.262.000	4	39.792.480	4	41.384.179	4	43.039.546	4	44.761.128	20	207.239.334	Kasubba g Umpeg	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	44.732.000	100%	46.521.280	100%	48.382.131	100%	50.317.416	100%	52.330.113	100%	242.282.941	Kasubb ag Perenke u	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur

	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	23.000.000	1	23.920.000	1	24.876.800	1	25.871.872	1	26.906.747	5	124.575.419	Bendahara Barang	Kab. Banjarr, Kec. Tatah Makmur	
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1.762.000	1	1.832.480	1	1.905.779	1	1.982.010	1	2.061.291	5	9.543.560	Bendahara Barang	Kab. Banjarr, Kec. Tatah Makmur	
			1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9.970.000	1	10.368.800	4	21.599.552	3	22.463.534	3	23.362.075	12	87.763.962	Bendahara Barang	Kab. Banjarr, Kec. Tatah Makmur
	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	1	10.400.000		0	0	0	0	0	2	20.400.000	Bendahara Barang	Kab. Banjarr, Kec. Tatah Makmur	
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	143.727.820	100%	149.476.933	100%	155.456.010	100%	161.674.251	100%	168.141.221	100%	778.476.234	Kasubbag Umpeg	Kab. Banjar, Kec. Tatah Makmur	
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.200.000	1	1.248.000	1	1.297.920	1	1.349.837	1	1.403.830	5	6.499.587	Kasubbag Umpeg	Kab. Banjarr, Kec. Tatah Makmur	
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.267.820	12	18.998.533	12	19.758.474	12	20.548.813	12	21.370.766	60	98.944.406	Kasubbag Umpeg	Kab. Banjarr, Kec. Tatah Makmur	
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	7	124.260.000	7	129.230.400	7	134.399.616	7	139.775.601	7	145.366.625	35	673.032.241	Kasubbag Umpeg	Kab. Banjarr, Kec. Tatah	

								yang Disediakan													Mak mur			
	7	1	1	2,09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100%	100%	89.457.300	100%	93.035.592	100%	96.757.016	100%	100.627.296	100%	104.652.388	100%	484.529.592	Kasubb ag Perenke u	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
	7	1	1	2,09	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	61.117.300	7	63.561.992	7	66.104.472	7	68.748.651	7	71.498.597	35	331.031.011	Bendaha ra Barang	Kab. Banja r, Kec. Tata h Mak mur
	7	1	1	2,09	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	6.340.000	3	6.593.600	3	6.857.344	3	7.131.638	3	7.416.903	15	34.339.485	Bendaha ra Barang	Kab. Banja r, Kec. Tata h Mak mur
	7	1	1	2,09	9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	1	12.480.000	1	12.979.200	1	13.498.368	1	14.038.303	5	64.995.871	Bendaha ra Barang	Kab. Banja r, Kec. Tata h Mak mur
			1	1	2,09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.400.000	1	10.816.000	1	11.248.640	1	11.698.586	5	54.163.226	Bendaha ra Barang	Kab. Banja r, Kec. Tata h Mak mur
	7	1	2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	83,00	5.506.000	83,50	5.726.240	84,00	5.955.290	84,50	6.193.501	85,00	6.441.241	85,00	29.822.272	Kasi Kessos	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
	7	1	2	2,02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	506.000	100%	526.240	100%	547.290	100%	569.181	100%	591.948	100%	2.740.659	Kasi Kessos	Kab. Banj ar, Kec. Tata h Mak mur
	7	1	2	2,02	3			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Laporan	6	506.000	6	526.240	6	547.290	6	569.181	6	591.948	6	2.740.659	Kasi Kessos	Kab. Banja r, Kec. Tata h Mak mur

	7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen				1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	8.000.000	Kasi PM	Kab. Banjara, Kec. Tatak Mur
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persen	100%	9.303.200	100%	9.675.328	100%	10.062.341	100%	10.464.835	100%	10.883.428	100%	50.389.132		Kasi Trantib	Kab. Banjar, Kec. Tatak Mur
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100%	6.651.600	100%	6.917.664	100%	7.194.371	100%	7.482.145	100%	7.781.431	100%	36.027.211		Kasi Trantib	Kab. Banjar, Kec. Tatak Mur
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4.000.000	1	4.160.000	1	4.326.400	1	4.499.456	1	4.679.434	5	21.665.290		Kasi Trantib	Kab. Banjar, Kec. Tatak Mur
	7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	2.651.600	1	2.757.664	1	2.867.971	1	2.982.689	1	3.101.997	5	14.361.921		Kasi Trantib	Kab. Banjar, Kec. Tatak Mur
	7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	100%	2.651.600	100%	2.757.664	100%	2.867.971	100%	2.982.689	100%	3.101.997	100%	14.361.921		Kasi Trantib	Kab. Banjar, Kec. Tatak Mur

	7	1	4	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	2.651.600	2	2.757.664	2	2.867.971	2	2.982.689	2	3.101.997	10	14.361.921	Kasi Trantib	Kab. Banjarnegara, Kec. Tata Makmur
	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	87.299.900	100%	90.791.896	100%	94.423.572	100%	98.200.515	100%	102.128.535	100%	472.844.418	Kasi PEM	Kab. Banjarnegara, Kec. Tata Makmur
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	87.299.900	100%	90.791.896	100%	94.423.572	100%	98.200.515	100%	102.128.535	100%	472.844.418	Kasi PEM	Kab. Banjarnegara, Kec. Tata Makmur
	7	1	5	2,01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Orang	100	23.500.000	100	24.440.000	100	25.417.600	100	26.434.304	100	27.491.676	500	127.283.580	Kasi PEM	Kab. Banjarnegara, Kec. Tata Makmur

	7	1	6	2,01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	2.000.000								1	2.000.000	Kasi PEM	Kab. Banjara, Kec. Tatah Makmur	
	7	1	6	2,01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	2.000.000	2	2.180.000	2	2.267.200	2	2.357.888	2	2.452.204	10	11.257.292	Kasi PEM	Kab. Banjara, Kec. Tatah Makmur
	7	01	06	2,01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen			1	1.080.000	1	1.123.200	1	1.168.128	1	1.214.853	4	4.586.181	Kasi PEM	Kab. Banjara, Kec. Tatah Makmur
	7	01	06	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen			1	2.080.000	1	2.163.200	1	2.249.728	1	2.339.717	4	8.832.645	Kasi PEM	Kab. Banjara, Kec. Tatah Makmur
	7	01	06	2,01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen			3	1.000.000	3	1.495.120	3	1.575.000	3	2.842.487	12	6.912.607	Kasi PEM	Kab. Banjara, Kec. Tatah Makmur

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2022-2026. Pencapaian kinerja tahun 2022 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2021, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Tatah Makmur selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan		Nilai	89,94	85	94,51
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur		Indeks	84,75	80	94,40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen	100%	100%	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	Dokumen	6	6	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	4	4	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	2	2	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen	100%	100%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi / Rencana X 100 %	Orang/bulan	14	14	100

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	1	1	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Realisasi / Rencana X 100 %	Persen	100%	100%	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Realisasi / Rencana X 100 %	laporan	1	1	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	12	12	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Realisasi / Rencana X 100 %	persen	100%	100%	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Realisasi / Rencana X 100 %	Dokumen	1	1	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	5	5	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	persen	100%	100%	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	Paket	5	5	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	7	7	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Paket	22	22	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	3	3	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	4	4	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	persen	100%	100%	100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	1	1	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit	1	1	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	unit	1	3	300
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit	1	-	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	persen	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Realisasi / Rencana X 100 %	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	7	7	100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Realisasi / Rencana X 100 %	persen	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Realisasi / Rencana X 100 %	unit	7	7	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	3	3	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	1	1	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	1	1	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	persen	83	85	102,41
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		persen	100%	100%	100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	laporan	6	6	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan		Persen	100%	100%	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	Laporan	4	4	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	RUMUS : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Dilaksanakan di Bagi Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Direncanakan dikali 100%	persen	100	100	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana		Persen	100	100	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Jenis Laporan yang di kelola	Lembaga Kemasyarakatan	13	13	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Laporan	3	3	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		persen	100	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100%	persen	100	100	100

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan meliputi sosialisasi perda/perkada, FKUB, Linmas desa, izin penelitian, dll	laporan	1	1	100
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		laporan	1	1	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		Persen	100%	100%	100
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Trantibumlinmas yang terlaksana	laporan	2	2	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persen	100%	10000%	10000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana dibagi Total Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Akan Dilaksanakan di Kecamatan di Kali 100%	Persen	100	100	100
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (HUT RI dan Rakor Forkopimcan, Kegiatan Keagamaan)	orang	100	100	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Dokumen	3	3	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persen	100	100	100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	RUMUS : Jumlah desa/kelurahan Yang Difasilitasi DIBAGI DENGAN Jumlah seluruh Desa yang ada di Kecamatan DIKALI 100%.	persen	100	100	100
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Menunjukkan Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjarangan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuangan dan aset desa, Terfasilitasinya penyelenggaraan pilkades penjarangan perangkat desa keuangan dan aset desa penyelenggaraan pemilihan BPD penyelenggaraan tapal batas terfasilitasinya BKAD Pelayanan PBB	dokumen	1	1	100
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		dokumen	1	-	0
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		dokumen	1	1	100
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		dokumen	1	-	0
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		dokumen	2	2	100

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Tatah Makmur Thn.2022

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir di atas menunjukan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Sasaran Program Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dengan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur dengan realisasi 84,75 sudah bisa mencapai target akhir priode renstra yakni 80 di tahun 2026.

Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 yaitu 89,94 dan untuk indikator kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2022 semua indikator kegiatan telah mencapai target akhir periode Renstra di tahun 2022.

A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021 DAN TARGET NASIONAL (JIKA ADA)

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional.

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, Realisasi Provinsi Dan Nasional

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	SATUAN	REALISASI PROVINSI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6

Tabel 3.5 tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, Target Provinsi Dan Nasional di atas belum bisa memuat perbandingan capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tatah Makmur dengan Target Provinsi dan Nasional mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible target Provinsi maupun nasional tersebut.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pada tahun 2021 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

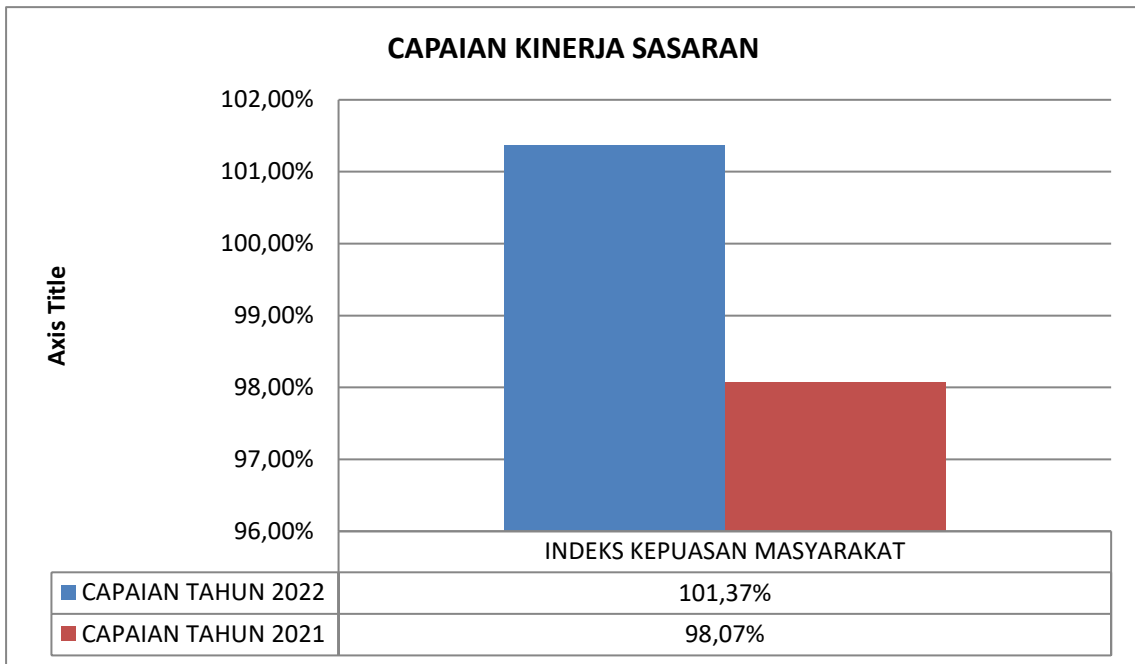
B.1 SASARAN 1

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat , terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Cukup berhasil** . Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

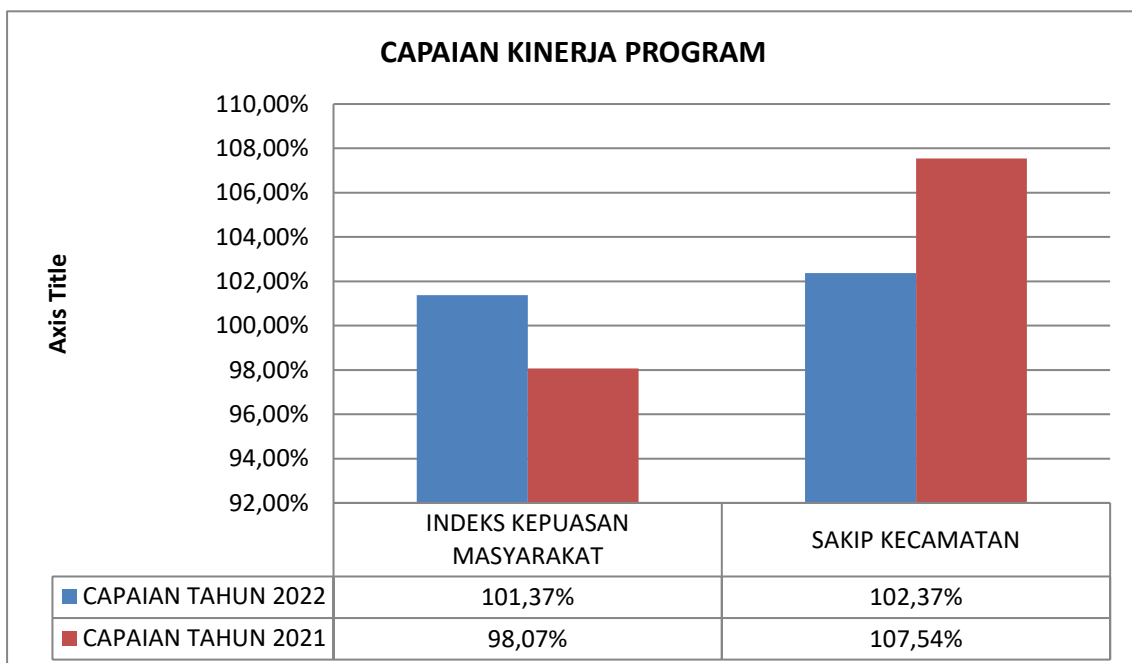
Tabel 3.6
Realisasi Indikator Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (Nilai Evaluasi Kecamatan)	70	89,94	128,48%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Thn.2022 dan LkjIP Thn.2021 Kec.Tatah Makmur



Capaian kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 101,37 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,07 % maka pada tahun 2022 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja, nilai tersebut mencapai target tahun 2022 yang sudah di tentukan.



Faktor penghambat keberhasilan sasaran/program :

Untuk tahun 2022 Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tatah Makmur realisasi sebesar 85,15 dari target 84 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 101,37% dengan kategori (**Berhasil**) di bandingkan dengan tahun 2021 di mana realisasi indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,38 dari target 84 maka di peroleh capaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 98,07% % artinya dilihat dari nilai persentase capaian kinerja tahun 2022 di bandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi kenaikan capaian kinerja tetapi capaian kinerja sasaran dan program tahun 2022 tersebut belum mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah di tentukan. Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP yaitu 71,66.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 yakni 100 % sesuai dengan hasil survey yang maksimal kepada responden..

Tidak terlaksananya Penanganan pengaduan, Saran & Masukan secara maksimal di mana petugas pelayanan dianggap kurang responsif dalam memberikan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam memberikan tidak maksimalnya Produk Pelayanan yang dihasilkan secara maksimal di mana kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam memberikan prodak yang dihasilkan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga dimana untuk menyelesaikan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga operator/Petugas e-KTP terkadang masih terkendala kurang lancarnya koneksi dgn server Disdukpencaipil sehingga petugas harus melakukan perekamam KTP dan Kartu Keluarga di Disdukpencaipil Kabupaten yang mengakibatkan memerlukan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan sebuah dokumen.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :

- 1) Petugas pelayanan lebih responsive terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan di kecamatan.
- 2) Monitoring dan evaluasi hasil dilakukan secara berkala agar tujuan yang diharapkan dpaat tercapai
- 3) Melakukan pelatihan seagai langkah pengembangan kapasitas SDM yang bertugas

- 4) Memanfaatkan semaksimal mungkin sarana pelayanan online yang disediakan oleh Disdukpencaipil Kabupaten

Upaya perbaikan :

Pelatihan aparatur kecamatan dalam rangka menambah wawasan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi bulanan juga diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan target serta ada kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta anggaran pemeliharaan sarana yang memadai sehingga apabila terjadi kerusakan alat dapat segera di atasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.

Tindak lanjut yang akan datang :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk untuk melaksanakan pelatihan serta anggaran pemeliharaan komputer pembuatan KTP sehingga ketika ada kerusakan dapat segera di perbaiki.
2. Memaksimalkan fasilitas jaringan internet di kecamatan agar apabila ada kendala dengan server masih bisa melakukan pelayanan secara online untuk pembuatan dokumen kependudukan.

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Tatah Makmur tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.481.692.786,- dengan realisasi Anggaran Rp 2.115.516.486,- (85,24 %) dengan rincian untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) dengan anggaran sebesar Rp. 1.894.692.786,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.565.175.713,- (82,61 %) dan untuk belanja langsung (belanja barang dan jasa) dengan anggaran sebesar Rp. 587.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 550.340.773,- (93,75 %).

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI CAPAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	70 Nilai	89,94	127,14	2.481.692.786	2.115.516.486	85,24
1	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur	73 Indeks	84,75	116,09	2.344.174.286	1.988.221.286	84,82
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100% Persen	100%	100%	3.821.120	3.805.000	99,58
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6	100	270.000	270.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	100	375.000	375.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	100	75.000	75.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	100	450.000	450.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	100	1.156.120	1.150.000	99,47

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4	100	750.000	740.000	98,67
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2	100	745.000	745.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% Persen	100%	100%	1.929.702.786	1.597.165.313	82,77
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14	100	1.894.692.786	1.565.175.713	82,61
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2	100	34.200.000	31.560.000	92,28
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	100	810.000	429.600	53,04
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100% Persen	100%	100%	9.499.800	9.367.500	98,61
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1	100	499.800	367.500	73,53
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12	100	9.000.000	9.000.000	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100% persen	100%	100%	10.700.000	10.700.000	100,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			700.000	700.000	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	1	20	10.000.000	10.000.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% persen	100%	100%	114.117.180	110.679.010	96,99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5	100	4.107.400	3.148.700	76,66
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	100	9.590.080	9.240.080	96,35
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7	100	1.823.500	1.823.500	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22 Paket	22	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3	100	2.846.200	2.598.720	91,30
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4	100	83.750.000	81.868.010	97,75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100% persen	100%	100	21.507.000	18.225.000	84,74
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1	100	-	-	

		Lapangan yang Disediakan						
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	1	100	1.762.000	-	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1	100	9.745.000	8.875.000	91,07
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1	100	10.000.000	9.350.000	93,50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	100%	100%	144.974.400	141.577.313	97,66
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	100	1.200.000	1.200.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	100	16.994.400	13.602.827	80,04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7	100	126.780.000	126.774.486	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100% persen	100%	100%	109.852.000	96.702.150	88,03
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7	100	76.982.000	70.739.150	91,89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	3	100	10.870.000	5.015.000	46,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1	100	12.000.000	11.000.000	91,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1	100	10.000.000	9.948.000	99,48
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100% persen	83	83%	5.506.000	5.100.000	92,63
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100% persen	100%	100%	506.000	100.000	19,76
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	6	100	506.000	100.000	19,76
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kgiatan Kesos Yang Dilaksanakan	100%	100%	100	5.000.000	5.000.000	100,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4	100	5.000.000	5.000.000	100,00

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100% persen	100	100%	43.513.400	37.514.000	86,21
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100% Persen	100	100	43.513.400	37.514.000	86,21
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	13	100	7.513.400	7.510.000	99,95
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3	100	36.000.000	30.004.000	83,34
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100% persen	100	100	9.303.200	9.053.200	97,31
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100% persen	100	100%	6.651.600	6.401.600	96,24
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1	100	4.000.000	3.750.000	93,75
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1	100	2.651.600	2.651.600	100,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	100%	100	2.651.600	2.651.600	100,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	2	100	2.651.600	2.651.600	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	65.195.900	62.628.000	96,06
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	100	100%	65.195.900	62.628.000	96,06

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	100	100	18.200.000	18.200.000	100,00
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3	100	46.995.900	44.428.000	94,54
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100	100	14.000.000	13.000.000	92,86
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100% persen	100	100	14.000.000	13.000.000	92,86
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1	100	2.000.000	2.000.000	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1	100	2.000.000	2.000.000	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	1	100	6.000.000	5.000.000,000	83,33
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	1	100	2.000.000	2.000.000,000	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 dokumen	2	100	2.000.000	2.000.000,000	100,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA						2.481.692.786	2.115.516.486	85,24
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG						587.000.000	550.340.773	93,75
BELANJA TIDAK LANGSUNG						1.894.692.786	1.565.175.713	82,61

Sumber : Simondalev Laporan Realisasi Kec.Tatah Makmur Thn.2022

Penjelasan :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan target indeks kinerja 73 dengan realisasi 84,75 serta realisasi capaian 116,09 % yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.344.174.286,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.988.221.286,- dengan Persentase capaian 84,82 % .

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan target persentase kinerja 100 dengan realisasi 83 serta realisasi capaian 83 % yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 5.506.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.100.000,- dengan Persentase capaian 92,63 % .

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan target persentase kinerja 100 dengan realisasi 100 serta realisasi capaian 100 % yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 43.513.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 37.514.000,- dengan Persentase capaian 86,21 % .

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dengan target persentase kinerja 100 dengan realisasi 100 serta realisasi capaian 100 % yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 9.303.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.053.200,- dengan Persentase capaian 97,31 %.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan target persentase kinerja 100 dengan realisasi 100 serta realisasi capaian 100 % yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 65.195.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 62.628.000,- dengan Persentase capaian 96,06 %.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan target persentase kinerja 100 dengan realisasi 100 serta realisasi capaian 100 % yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dengan Persentase capaian 92,86 %.

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Dari 6 (enam) program 5 (lima) program mayoritas menunjukkan pencapaian yang sama dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100% , untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencapai kinerja sebanyak 116,09 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 84,82 % dari total anggaran yang dialokasikan. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,

mencapai kinerja sebanyak 83 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 92,63% dari total anggaran yang dialokasikan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 86,21% dari total anggaran yang dialokasikan. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 97,31 % dari total anggaran yang dialokasikan. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 96,06 % dari total anggaran yang dialokasikan. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 92,86 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3.4.2
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 (100% - Kol 5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	127,14	85,24	14,76
1	Terselenggaranya urusan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur	116,09	84,82	15,18
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	99,58	0,42
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	100,00	0,00

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	99,47	0,53
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	98,67	1,33
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	82,77	17,23
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	82,61	17,39
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	92,28	7,72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	53,04	46,96
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	98,61	1,39
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	73,53	26,47
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100,00	0,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	100,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	96,99	3,01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	76,66	23,34
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	96,35	3,65
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	100,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	91,30	8,70
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	97,75	2,25
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	84,74	15,26
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100		100,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	0,00	100,00

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	91,07	8,93
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	93,50	6,50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	97,66	2,34
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	80,04	19,96
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100%	88,03	11,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	91,89	8,11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	46,14	53,86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	91,67	8,33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	99,48	0,52
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	83%	92,63	7,37
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	19,76	80,24
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	19,76	80,24
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	100	100,00	0,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	100,00	0,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	86,21	13,79
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	86,21	13,79
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	99,95	0,05
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	83,34	16,66

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	97,31	2,69
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	96,24	3,76
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	93,75	6,25
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	100,00	0,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100,00	0,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	100,00	0,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	96,06	3,94
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	96,06	3,94
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	100,00	0,00
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100	94,54	5,46
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	92,86	7,14
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100	92,86	7,14
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	100,00	0,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan	100	100,00	0,00

		Pendayagunaan Aset Desa			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100	83,33	16,67
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100	100,00	0,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	100	100,00	0,00

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022 memperoleh nilai 71,66 dengan interpretasi predikat BB (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. maka pada tahun 2022 direkomendasikan kepada Camat Tatah Makmur hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadikan Dokumen Renstra sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
2. Melaksanakan monitoring target jangka menengah dalam Renstra dengan tahun berjalan;
3. Membuat Perjanjian Kinerja Camat dan PK turunannya yang menyajikan IKU;
4. Membuat Rencana Aksi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK)
5. Melaksanakan monitoring rencana aksi yang tidak hanya terbatas pada penyerahan atau pengumpulan data capaian kinerja, namun juga dirumuskan mengenai upaya dan solusi terhadap setiap hambatan/ masalah;
6. Memanfaatkan Rencana aksi dan target target kinerja dalam setiap pengarahan serta menjadikannya sebagai acuan untuk mengevaluasi capaian output kegiatan;
7. Mengembangkan bantuan teknologi dalam hal pengukuran kinerja berjenjang sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
8. Menyusun LKjIP secara lengkap dengan menyajikan Informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome/output penting serta menyajikan data kinerja yang andal;
9. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi kinerja dan program atas Rencana Aksi dengan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan memanfaatkan hasil

pemantauan rencana aksi berupa tindak lanjut dan perbaikan dalam bentuk langkah-langkah nyata serta memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, (SKPD) telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Kinerja Bawahan dari Camat, Kasi, dan Staf.
2. Membuat jadwal monitoring kinerja
3. Rencana Aksi harus selaras dengan PK
4. Laporan Triwulan III dan IV
5. Tata cara penilaian Reward and Punishment

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari indikator kinerja yang diperjanjikan Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Tatah Makmur masuk dalam kategori **Berhasil** dengan target 84 dan realisasi 85,15 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 128,48 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.344.174.286,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.988.221.286,- atau sebesar 84,82 % hal ini disebabkan antara lain :

1. Pelayanan penanganan pengaduan serta saran dan masukan belum maksimal, dimana menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta anggaran pemeliharaan sarana yang memadai perlu di tingkatkan agar apabila terjadi kerusakan alat dapat segera di atasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.
3. Masih terkendalanya jaringan internet di kecamatan Tatah Makmur sehingga pelayanan online oleh Disdukpencahil belum bisa di manfaatkan secara maksimal
4. Belum adanya pelatihan ataupun bimbingan teknis oleh bidang Pemerintahan terhadap petugas Paten sementara perangkat komputer untuk aplikasi SIMPATEN telah tersedia sehing pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal.

Dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang memperoleh nilai unsur pelayanan tertinggi adalah biaya / tarif (3,96) sedangkan nilai unsur pelayanan terendah ada pada unsur Waktu Penyelesaian,dan Kompetensi Pelaksana (3,15).

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelatihan aparatur kecamatan dalam rangka menambah wawasan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
3. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan laporan SAKIP.

Laporan Kinerja Kecamatan Tatah Makmur tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
3. Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA.2022
4. Rekap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022